

**KEEFEKTIVITASAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Oleh:

WIDIYA LUVITA SARI

NPM 2216041139



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

DAFTAR ISI

Isi

I. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan penelitian.....	9
1.4 Manfaat penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Tinjauan Teori Efektivitas.....	13
2.3 Program Keluarga Harapan.....	15
2.4 Kemiskinan.....	17
2.5 Kerangka Berpikir	21
III. Metode Penelitian	23
3.1 Tipe Penelitian.....	23
3.2 Fokus Penelitian	23
3.3 Lokasi Penelitian	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24
3.5 Teknik Keabsahan Data	24
3.6 Uji Keabsahan Data.....	25
IV. Hasil dan Pembahasan	26
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	26
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	26
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	27
V. Penutup	30
5.1 Kesimpulan.....	30
5.2 Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	32

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbedaan ekonomi antara kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, bersama dengan tingkat kemiskinan atau jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan, adalah dua isu utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang.

Sabinus Beni (2017) Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan kenyataan yang ada. Manusia dilahirkan ke dunia adalah untuk bahagia, sejahtera, makmur dan sukses.

Kemiskinan dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor, seperti tingkat kualitas hidup yang rendah bagi penduduk, tingkat pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, masalah gizi pada anak-anak, serta keterbatasan akses terhadap sumber air minum yang layak. Dampak dari faktor-faktor ini dapat mengancam masa depan generasi muda, Simanjuntak (2010).

Kelompok penduduk miskin yang ada di masyarakat pedesaan dan perkotaan biasanya memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, petani kecil, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis (gepeng), serta pengangguran. Keberadaan kelompok miskin ini dapat menyebabkan masalah yang berlanjut terkait dengan kemiskinan kultural dan struktural, terutama jika tidak diatasi dengan serius, terutama untuk generasi berikutnya. Umumnya, penduduk yang termasuk dalam kelompok miskin ini merupakan “golongan residual” yang berarti bahwa mereka belum mendapatkan manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah yang secara khusus ditujukan kepada mereka, seperti Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), namun secara umum mereka mungkin telah berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bimbingan Masyarakat (Bimas), Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan, Program Keluarga Berencana (KB), Koperasi Unit Desa (KUD), PKK di desa, dan lain sebagainya. Kelompok ini sulit untuk mendapatkan perhatian karena kualitas sumber daya yang rendah sehingga mereka kurang mampu memanfaatkan berbagai fasilitas, termasuk faktor-faktor produksi.

Masalah kemiskinan saat ini telah menjadi isu yang berkepanjangan di Indonesia banyak sekali dampak yang terjadi akibat kemiskinan yaitu bidang pendidikan banyak anak-anak dari keluarga miskin terpaksa menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Mereka mungkin terhalang oleh biaya pendidikan, kurangnya akses ke sarana pendidikan, atau

bahkan harus bekerja untuk membantu keluarga mereka, yang menghambat perkembangan pendidikan mereka.

Pada kesehatan akibat rendahnya ekonomi keluarga miskin di Indonesia tidak dapat membayar perawatan medis yang diperlukan, dan ini dapat mengakibatkan penyakit yang tidak terkontrol dan memburuk kesehatan yang buruk juga dapat berdampak pada produktivitas seseorang. Akibat dari kemiskinan ini tingkat kualitas hidup masyarakat jauh dari kata layak mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam kebutuhan pangan, papan dan pakaian.

Adapun faktor-faktor yang mendorong masalah kemiskinan di Indonesia sangat beragam dan kompleks. Pertama, laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menjadi salah satu kontributor utama dengan populasi yang besar, persaingan untuk lapangan kerja dan akses sumber daya ekonomi menjadi lebih ketat. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak bekerja juga menjadi permasalahan serius, mengakibatkan potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kebijakan pemerintah yang tidak selalu tepat sasaran juga turut berkontribusi dalam masalah ini, di mana diperlukan pembenahan dalam pengelolaan dan distribusi bantuan sosial.

Serta tidak ada kesetaraan distribusi pendapatan antara daerah-daerah di Indonesia menjadi kendala serius, dengan beberapa wilayah yang jauh lebih makmur daripada yang lain. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan tantangan yang kompleks dalam upaya mengatasi kemiskinan di negara ini.

Berdasarkan rumusan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan memangkas warganya yang berada dalam kemiskinan. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan diimplementasikan melalui berbagai program mulai dari yang sifatnya bantuan sosial, pemberdayaan sampai kepada pemberian kredit usaha pada target yang memenuhi persyaratan di mana salah satu program bantuan sosial yang dipadukan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah Program Keluarga Harapan, Evi Fitriah (2010).

Pengaruh dari banyaknya faktor dan dampak kemiskinan di Indonesia pihak pemerintahan membuat salah satu program pada tahun 2007 yang disinyalir mampu mengurangi angka kemiskinan serta menjadi upaya pemberdayaan masyarakat miskin atau kurang mampu yaitu

Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>, 2023), Program Perlindungan Sosial, yang juga dikenal dengan sebutan Conditional Cash Transfers (CCT) di tingkat internasional, telah terbukti berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan kronis di negara-negara tersebut.

Sebagai program bantuan sosial dengan syarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses bagi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan menjaga taraf kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi.

Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan pendampingan. Ini juga mencakup akses ke berbagai program perlindungan sosial lain yang merupakan program yang melengkapi secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi pusat dan pusat keunggulan dalam upaya mengatasi kemiskinan yang menggabungkan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial nasional.

Pada tingkat jangka pendek, bantuan ini memberikan bantuan langsung dalam mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yang dapat membantu mereka mengatasi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Namun, pada tingkat jangka panjang, bantuan ini juga memiliki persyaratan yang mendorong keluarga penerima untuk mengambil langkah-langkah penting dalam meningkatkan kondisi kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, tertulis dalam pasal 5 kriteria komponen-komponen yang menjadi syarat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Kriteria untuk komponen kesehatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3, mencakup:

- a. Perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui dan
- b. Anak-anak yang berusia antara 0 (nol) hingga 6 (enam) tahun.

Kriteria untuk komponen pendidikan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3, mencakup:

- a. anak-anak yang sedang bersekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau tingkat yang setara;

- b. Anak-anak yang sedang bersekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau tingkat yang setara
- c. Anak-anak yang sedang bersekolah menengah atas/madrasah aliyah atau tingkat yang setara dan
- d. Anak-anak yang berusia antara 6 (enam) hingga 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun.

Kriteria untuk komponen kesejahteraan sosial, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3, mencakup:

- a. Orang yang sudah lanjut usia, yaitu mereka yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan
- b. Penyandang disabilitas, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang mengalami disabilitas berat.

Dalam Pasal 6, dijelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhak memperoleh:

- a. Bantuan Sosial dari PKH;
- b. Pendampingan yang disediakan oleh PKH;
- c. Layanan yang diberikan di fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau sosial kesejahteraan dan
- d. Program Bantuan Komplementer di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, energi subsidi, ekonomi, perumahan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kota Bandar Lampung, sebagai salah satu kota yang berada di Pulau Sumatera, juga tidak luput dari dampak kemiskinan yang melanda masyarakatnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung untuk tahun 2022, tercatat sekitar 91 ribu jiwa masyarakat miskin atau kurang mampu di kota ini. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, ketika jumlah masyarakat kurang mampu mencapai 99 ribu jiwa, angka tersebut tetap menjadi permasalahan serius.

Ekardo (2014) dalam studi berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan”, menyimpulkan bahwa tujuan Program Keluarga Harapan di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah berhasil tercapai, terutama jika melihat dari aspek pendidikan dan kesehatan. Dalam hal pendidikan, minat anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk bersekolah telah meningkat karena mereka

sekarang memiliki pakaian dan perlengkapan sekolah yang memadai, yang berbeda dengan situasi sebelum mereka menjadi peserta PKH. Di bidang kesehatan, ibu rumah tangga miskin kini lebih sering membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas, dan anak-anak tidak lagi mengalami masalah kekurangan gizi. Temuan ini didasarkan pada data primer yang dikumpulkan oleh peneliti dari petugas Puskesmas.

Ananda Dwi Arum (2022) dalam studinya yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun”, berkaitan dengan efektivitas PKH di Nagori Kandangan, penulis mempunyai hasil dari beberapa masalah, termasuk keterlambatan dalam penyaluran dana PKH. Dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat, seringkali terjadi keterlambatan yang signifikan, bahkan beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) tidak menerima dana tersebut sama sekali.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong kemiskinan di Kota Bandar Lampung:

1. Pertumbuhan Penduduk yang Cepat

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada masalah kemiskinan di Kota Bandar Lampung adalah pertumbuhan penduduk yang cepat. Populasi yang terus bertambah dapat menciptakan tekanan besar pada lapangan pekerjaan dan sumber daya ekonomi. Dengan penduduk yang terus berkembang, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang stabil semakin meningkat.

2. Pengangguran dan Tidak partisipan dalam Angkatan Kerja

Tingginya angka pengangguran atau tidak partisipan dalam angkatan kerja, khususnya di kalangan kelompok usia produktif, juga merupakan faktor yang memperburuk masalah kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Banyak warga yang berada dalam usia yang potensial untuk bekerja namun tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Hal ini berdampak negatif pada perekonomian mereka dan meningkatkan tingkat kemiskinan di kota ini

3. Kebijakan Pemerintah yang Tidak Tepat Sasaran

Tidak tepatnya sasaran kebijakan pemerintah dapat menjadi penyebab kemiskinan yang signifikan. Jika bantuan sosial dan program ekonomi tidak dirancang dengan baik atau tidak mencapai kelompok yang benar-benar membutuhkannya, maka masyarakat yang rentan akan terus mengalami kesulitan.

4. Tidak Setaranya Distribusi Pendapatan

Tidak setaranya dalam distribusi pendapatan antar wilayah di Kota Bandar Lampung juga merupakan isu yang perlu diatasi beberapa wilayah mungkin jauh lebih makmur daripada yang lain, dan hal ini dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Kesenjangan ini memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung telah menjadi salah satu upaya yang signifikan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Melalui bantuan keuangan langsung, insentif pendidikan, akses layanan kesehatan, dan pendampingan, PKH berupaya memberikan dukungan holistik kepada keluarga miskin dan rentan di kota ini.

Selain itu, program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial sekali, tetapi juga berfokus pada pemantauan dan evaluasi jangka panjang untuk memastikan bahwa keluarga penerima manfaat dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik secara berkelanjutan. Integrasi PKH dengan program bantuan sosial lainnya juga menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, menjadikan PKH sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu di Kota Bandar Lampung.

Bantuan keuangan langsung yang diberikan oleh PKH memiliki dampak yang signifikan dalam meredakan beban ekonomi keluarga miskin di Bandar Lampung dana yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sebagian besar keluarga penerima manfaat PKH menghadapi ketidakpastian ekonomi yang tinggi, dan bantuan ini memberikan keamanan finansial yang sangat dibutuhkan dengan mengurangi tekanan ekonomi, PKH memungkinkan keluarga untuk fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain bantuan keuangan, PKH memberikan insentif pendidikan yang memiliki implikasi besar dalam menciptakan perubahan sosial. Hal ini memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar pengurangan kemiskinan saat ini dengan memastikan pendidikan anak-anak, PKH berinvestasi dalam masa depan generasi muda Bandar Lampung. Pendidikan adalah kunci untuk mengakhiri siklus kemiskinan, dan PKH membuka pintu bagi anak-anak ini untuk memiliki peluang yang lebih baik dalam hidup.

PKH juga membuka akses yang lebih besar ke layanan kesehatan yang berkualitas, pendampingan adalah aspek penting dari PKH program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial dan mengharapakan keluarga untuk mengelolanya sendiri. Sebaliknya, pendampingan

disediakan untuk membantu keluarga dalam merencanakan pengeluaran dan memastikan bahwa dana PKH digunakan dengan bijaksana pendamping ini tidak hanya berperan sebagai penasihat keuangan, tetapi juga sebagai sumber daya yang membantu keluarga untuk memahami bagaimana mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi. Pendampingan seperti ini sangat berharga, karena membantu melengkapi keluarga dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya dengan bijak.

Selain komponen utama ini, PKH juga mengintegrasikan dirinya dengan berbagai program bantuan sosial lainnya yang ada di Bandar Lampung hal ini merupakan langkah cerdas, karena membantu menciptakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mengatasi masalah kemiskinan. Banyak keluarga miskin menghadapi berbagai tantangan yang melampaui sekadar ekonomi, seperti tidak adanya kesetaraan dalam akses ke pendidikan dan layanan kesehatan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Bandar Lampung harus adanya efektivitas pelaksanaan program dan pemantauan yang lebih ketat, sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengatasi kemiskinan, peran masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan dalam masyarakat. Masyarakat sipil dapat berperan dalam pemantauan dan advokasi, sementara sektor swasta dapat berkontribusi dengan menciptakan peluang kerja dan investasi yang dapat membantu meningkatkan perekonomian kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan masalah maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana keefektivitasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meminimalisir angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung?”.

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini mencakup pengukuran dampak nyata yang telah dihasilkan oleh PKH terhadap kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat.

1.4 Manfaat penelitian

Untuk mengukur sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini mencakup pengukuran dampak nyata yang telah dihasilkan oleh PKH terhadap kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka menggunakan penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan pembanding dan referensi melalui hasil-hasil dari penelitian. Dalam konteks ini penulis memanfaatkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
Adinda Chivita Fauziah, Tuah Nur, Rizki Hegia Sampurna (2020)	Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Hal ini terutama terlihat dalam aspek struktur birokrasi seperti pertanggungjawaban, koordinasi, dan kerjasama, serta dalam adaptasi. Selain itu, pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan juga memberikan kontribusi positif terhadap penanggulangan kemiskinan, menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan kebijakan, semakin efektif upaya penanggulangan kemiskinan.	Persamaan penelitian Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas program keluarga harapan dan menggunakan metode penelitian kuantitatif Perbedaan penelitian Terletak pada tempat penelitian

Isti Putri Utami, Kordiyana K. Rangga, Helvi Yanfika, Abdul Mutolib (2021)	Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Bandar Lampung	Kinerja pendamping PKH di Kota Bandar Lampung secara keseluruhan berada pada tingkat sedang, menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan tugas sesuai prosedur, meskipun ada beberapa pendamping yang belum menyampaikan seluruh materi P2K2 dan tidak memantau kehadiran KPM PKH. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pendamping meliputi pendidikan non formal, motivasi, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan persepsi terhadap insentif. Untuk meningkatkan kinerja pendamping dan mencapai tujuan PKH, perlu meningkatkan pendidikan non formal, motivasi, disiplin kerja, kondisi lingkungan kerja, dan insentif pendamping.	Persamaan Penelitian Menganalisis kinerja pendamping PKH yang akan menjuru ke efektivitasan kebijakan tersebut Perbedaan Penelitian Penelitian tersebut hanya berfokus pada bagaimana kinerja pendamping Program Keluarga Harapan.
--	--	---	--

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, banyak laporan yang telah mengidentifikasi bahwa tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan dapat diukur melalui berbagai perspektif. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengeksplorasi efektivitas bantuan sosial yang diselenggarakan dalam Program Keluarga Harapan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung, penelitian ini merujuk pada temuan-temuan penelitian sebelumnya sebagai dasar atau landasan. Dalam konteks ini, penelitian sebelumnya memegang peran

penting sebagai fondasi yang membantu memberikan sudut pandang yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih komprehensif. Penggunaan kerangka teori tentang kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli seperti Amartya Sen, Jeffrey Sachs, dan Esther Duflo menjadi penting untuk memberikan konteks dan landasan yang kuat bagi penelitian ini.

2.2 Tinjauan Teori Efektivitas

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris "effective," yang dapat diartikan sebagai "sukses" atau "pencapaian yang baik." Dalam kamus ilmiah yang lebih populer, efektivitas didefinisikan sebagai tingkat ketepatan penggunaan, hasil yang didapat, atau sejauh mana sesuatu mendukung mencapai tujuan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah kemampuan suatu hal untuk memiliki efek atau dampak yang dapat diinterpretasikan sebagai mencapai hasil yang diinginkan, berhasil digunakan, atau mulai diterapkan.

Efektivitas menjadi elemen yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi. Organisasi sering beroperasi dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian, dan pengumpulan data sering kali terbatas. Lingkungan yang terus berubah seiring dengan perubahan zaman, teknologi, dan masyarakat dapat berdampak besar terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Oleh karena itu, adaptasi dan perubahan dalam menghadapi perubahan lingkungan menjadi suatu keharusan bagi organisasi guna mempertahankan efektivitas mereka.

Konsep efektivitas yang diuraikan dalam kalimat tersebut juga sejalan dengan pandangan yang dinyatakan oleh Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul "Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja." Sedarmayanti membawa pemahaman yang penting tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan efektivitas dalam konteks manajemen dan produktivitas. Efektivitas dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai sebuah tolok ukur atau parameter yang memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu target atau sasaran dapat berhasil dicapai. Dalam praktiknya, efektivitas menyoroti kemampuan sebuah organisasi atau individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diharapkan. Ini melibatkan identifikasi dan pengukuran hasil yang dihasilkan dalam kaitannya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut pandangan Sondang P. Siagian (2010), efektivitas dapat dijelaskan sebagai kemampuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan secara sadar untuk menciptakan sejumlah barang atau jasa

melalui aktivitas yang dilakukan. Pandangan ini membawa kita pada pemahaman bahwa efektivitas sejatinya adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ketika suatu kegiatan atau program berhasil mendekati atau bahkan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka efektivitasnya semakin tinggi.

Penting untuk diingat bahwa efektivitas bukan sekadar tentang pencapaian tujuan, tetapi juga tentang bagaimana sumber daya yang ada digunakan secara bijaksana dan optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks bisnis atau organisasi, efektivitas dapat diukur dengan sejauh mana hasil produksi atau layanan mendekati atau melebihi target yang telah ditetapkan. Dalam konteks perubahan dan perkembangan, pemahaman efektivitas menjadi panduan untuk menilai sejauh mana suatu upaya mencapai hasil yang diharapkan, serta sebagai alat untuk terus memperbaiki dan mengembangkan proses guna mencapai efektivitas yang lebih tinggi.

Dalam pandangan Gibson (1985:34), efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan dan target yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu usaha. Tingkat efektivitas dapat diukur melalui sejauh mana tujuan dan target tersebut berhasil tercapai. Keberhasilan mencapai tujuan dan target ini akan bergantung pada sejauh mana pengorbanan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, tingkat efektivitas mencerminkan sejauh mana upaya dan komitmen yang telah diinvestasikan dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut pandangan Emerson yang dikutip oleh Handayani (1990:16), efektivitas dapat dijelaskan sebagai penilaian terhadap pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, Handayani (1990:16) memberikan penjelasan lebih lanjut dengan menggambarkan bahwa efektivitas terjadi ketika sasaran atau tujuan telah berhasil dicapai sesuai dengan perencanaan awal. Sebaliknya, ketika tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka efektivitas tidak tercapai.

Dalam konteks ini, efektivitas menjadi ukuran yang sangat penting dalam mengevaluasi apakah suatu usaha atau kegiatan telah berhasil atau tidak. Apabila hasil mencapai atau bahkan melebihi apa yang telah direncanakan, maka tingkat efektivitas tinggi. Namun, jika hasil tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka tingkat efektivitas rendah.

Konsep ini memberikan pandangan yang jelas tentang pentingnya perencanaan dan pengukuran terhadap pencapaian tujuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bisnis, organisasi, dan perencanaan pribadi. Efektivitas menjadi petunjuk yang berguna dalam

mengevaluasi kesuksesan dan mendukung perbaikan proses untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Menurut Mahmudi (2005:92), konsep efektivitas dapat dijelaskan sebagai hubungan antara hasil yang diperoleh (output) dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar kontribusi hasil yang diperoleh terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau organisasi tersebut dianggap. Fokus utama efektivitas adalah pada hasil dari program atau kegiatan, dan efektivitas dapat dinilai dengan baik jika hasil yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang telah diharapkan.

Dengan merujuk pada pendapat-pendapat tersebut, efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan atau sasaran suatu kegiatan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, efektivitas berhubungan erat dengan hasil atau output dari kegiatan tersebut, serta dampak yang dihasilkan (outcome). Suatu kegiatan atau program akan dianggap efektif jika hasil yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana awal. Ini menunjukkan bahwa efektivitas berperan penting dalam menilai kesuksesan dan relevansi suatu program atau kegiatan.

2.3 Program Keluarga Harapan

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), PKH adalah sebuah inisiatif yang memberikan bantuan sosial dengan syarat kepada individu atau keluarga yang berada dalam kondisi miskin dan rentan, yang telah terdaftar dalam basis data terpadu untuk penanganan fakir miskin. Data ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan mereka yang memenuhi kriteria ditetapkan sebagai penerima manfaat dari program PKH.

a. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Kriteria komponen kesehatan yaitu ibu hamil atau menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria pendidikan yaitu anak sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidayah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas (SMA)/Madrasah Aliyah atau sederajat, anak usia 6 (enam)

sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial yaitu lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat.

b. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu :

1. Perencanaan
2. Penetapan calon peserta PKH
3. Validasi data calon penerima manfaat PKH
4. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH
5. Penyaluran bantuan sosial PKH
6. Pendampingan PKH
7. Peningkatan kemampuan keluarga
8. Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH
9. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH
10. Transformasi ke peserta PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu inisiatif pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan membantu keluarga dan individu yang hidup dalam kondisi miskin dan rentan. PKH didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 sebagai program bantuan sosial bersyarat. Program ini memberikan bantuan tunai kepada mereka yang terdaftar dalam database terpadu untuk penanganan fakir miskin, yang dielaborasi dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Secara lebih rinci, Buku Pedoman Program Keluarga Harapan menjelaskan bahwa PKH adalah bentuk Conditional Cash Transfers (CCT), yang dikenal secara internasional. Artinya, bantuan ini diberikan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat. Tujuannya adalah untuk memberikan dorongan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

PKH merupakan salah satu strategi penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Dengan memberikan bantuan secara terencana kepada keluarga miskin dan rentan, program ini berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta membantu menciptakan peluang bagi mereka yang paling membutuhkan.

Sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah menerapkan program bantuan tunai bersyarat (BTB), yang lebih dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH). Pada awalnya, program ini dirancang khusus untuk membantu kelompok masyarakat yang paling miskin dengan memberikan akses kesehatan kepada ibu hamil dan anak-anak sejak dalam kandungan, serta pendidikan, dengan harapan dapat memutus mata rantai kemiskinan. PKH tidak hanya berfungsi sebagai kelanjutan dari program subsidi langsung tunai yang telah berjalan lama, yang bertujuan membantu keluarga dalam menjaga daya beli mereka ketika harga bahan bakar minyak disesuaikan oleh pemerintah.

Lebih dari itu, PKH dirancang sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin dan pada saat yang sama, memutus mata rantai kemiskinan yang telah berlangsung selama ini. Dengan demikian, PKH bukan hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang lebih baik bagi mereka yang memerlukan, serta membantu mencapai tujuan pemutusan rantai kemiskinan yang telah lama menjadi permasalahan di Indonesia. Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan memutuskan siklus kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku rumah tangga miskin (RTM) yang cenderung tidak mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM.

2.4 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau suatu wilayah mengalami keterbatasan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan dasar yang biasanya diharapkan dalam suatu daerah. Keterbatasan ini terlihat dari pendapatan yang rendah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dampak dari pendapatan yang rendah tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar,

melainkan juga berpengaruh pada kesulitan mencapai standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Kemiskinan dapat dijelaskan sebagai keadaan di mana seseorang tidak mampu menjaga dirinya sendiri sesuai dengan tingkat kehidupan yang umumnya diterima oleh masyarakat dan juga tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi secara fisik dan mental dalam kelompok tertentu. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki dampak yang melampaui keterbatasan ekonomi semata, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang atau kelompok dalam masyarakat.

Shirazi dan Pramanik, seperti yang disebutkan oleh Irfan Syauqi Beik, menggambarkan kemiskinan sebagai suatu keadaan yang dialami oleh individu atau kelompok orang ketika mereka tidak memiliki sumber daya yang mencukupi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang nyaman. Keadaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dimensi ekonomi, sosial, psikologis, dan bahkan dimensi spiritual.

Pandangan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kemiskinan, mengakui bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kesehatan mental, dan aspek-aspek spiritual dalam kehidupan individu atau kelompok. Pendekatan ini memungkinkan upaya yang lebih holistik dalam mengatasi kemiskinan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi yang memengaruhinya.

Syami, sebagaimana dijelaskan oleh Cica Sartika dan rekan-rekannya, menguraikan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu, keluarga, atau anggota masyarakat tertentu tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak, sebagaimana halnya dengan anggota masyarakat lainnya pada umumnya. Penduduk miskin secara umum sering terkonsentrasi di daerah pedesaan, suatu pandangan yang didukung oleh Hans Dieter dan Suwardi. Mereka mengemukakan bahwa kemiskinan di pedesaan dapat dikategorikan dalam dua aspek utama, yaitu kemiskinan tempat tinggal dan kemiskinan penduduk.

Kemiskinan tempat tinggal merujuk pada kondisi fisik tempat tinggal yang tidak teratur dan kurang terurus. Sedangkan kemiskinan penduduk, dilihat dari perspektif sosial dan ekonomi, menggambarkan tingkat pendapatan yang sangat rendah, mencakup kurangnya akses kepada fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, serta infrastruktur minimal. Berdasarkan pandangan ini,

kita dapat memahami bahwa kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Ini berlaku baik untuk aspek ekonomi maupun sosial, serta meliputi ketidakmampuan untuk mengakses layanan dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Pemahaman ini menunjukkan kompleksitas kemiskinan, yang tidak hanya terkait dengan pendapatan rendah, tetapi juga dengan kondisi tempat tinggal dan akses terhadap sumber daya penting. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus melibatkan upaya yang holistik dan beragam untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan komunitas.

Beberapa pakar dan lembaga telah memberikan definisi tentang kemiskinan. BAPPENAS (1993) menjelaskan kemiskinan sebagai keadaan serba kekurangan yang bukan disebabkan oleh keinginan si miskin, melainkan oleh kondisi yang tidak dapat dihindari dengan sumber daya yang dimilikinya. Levitan (1980) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan kekurangan akan barang-barang dan layanan yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Ellis (1994), kemiskinan adalah gejala multidimensional yang bisa dianalisis dari berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, dan politik. Suparlan (1993) mengartikan kemiskinan sebagai tingkat hidup yang rendah, yaitu ketika sejumlah orang atau kelompok mengalami kekurangan materi dibandingkan dengan standar umum dalam masyarakat mereka. Reitsma dan Kleinpenning (1994) menggambarkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi maupun non-materi.

Friedman (1979) berpendapat bahwa kemiskinan melibatkan ketidaksetaraan dalam kesempatan untuk memiliki basis kekuasaan sosial, yang mencakup aset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber daya finansial (pendapatan dan akses kredit), organisasi sosial politik yang mendukung kepentingan bersama, jaringan sosial, pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang berguna. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kemiskinan melibatkan banyak aspek, termasuk tidak hanya kondisi ekonomi, tetapi juga faktor-faktor sosial, politik, dan kekuatan sosial. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang dapat berupa hasil dari ketidakmampuan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (<https://profsyamsiah.wordpress.com> diakses pada 11/09/2023).

Soekanto (1990) menyajikan pemahaman tentang kemiskinan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sesuai dengan standar kehidupan yang berlaku dalam kelompoknya, dan juga tidak mampu untuk mengutilikan potensi mental maupun fisiknya dalam konteks kelompok tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah kemiskinan masih ada di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan sering kali dikaitkan dengan keterbelakangan serta ketertinggalan. Kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang sangat serius. Untuk mencari solusi yang relevan dalam mengatasi masalah kemiskinan, penting untuk memahami penyebab-penyebabnya dan menganalisis akar permasalahannya, sehingga potensi yang sebenarnya terkandung dalam sumber daya masyarakat pedesaan dapat diidentifikasi.

Kemiskinan, pada dasarnya, merupakan keadaan di mana seseorang menghadapi keterbatasan sumber daya yang tidak dapat dihindari, bukan karena keinginan dari individu yang bersangkutan. Kemiskinan ditandai oleh sikap dan perilaku yang pasif terhadap situasi yang sulit diubah, tercermin dalam kurangnya motivasi untuk kemajuan, produktivitas yang rendah, terbatasnya modal yang tersedia, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan peluang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Dep Tan, 1996).

Karena itu, dalam usaha mengatasi kemiskinan, hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah membuat mereka sadar bahwa standar kehidupan mereka saat ini sangat rendah. Selanjutnya, penting untuk meyakinkan mereka bahwa situasi ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan kata lain, langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan harus dimulai dengan memberdayakan individu yang berada dalam kondisi miskin. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan yang berkelanjutan, dengan prinsip mendorong mereka untuk mandiri dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan. Dengan cara ini, mereka dapat lebih mampu untuk mengakses berbagai fasilitas dan peluang yang tersedia dalam berbagai aspek seperti sumber daya, modal, teknologi, dan pasar. Batasan kemiskinan umumnya diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau mencapai tingkat kehidupan yang layak.

Konsep kemiskinan bisa dijabarkan dalam dua perspektif utama, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kedua pendekatan ini berkaitan dengan kepemilikan materi dan bagaimana hal itu terhubung dengan standar kelayakan hidup individu atau keluarga.

Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif mencerminkan perbedaan sosial yang muncul dalam masyarakat berdasarkan distribusi pendapatan. Perbedaan pokok antara keduanya

terletak pada cara pengukurannya. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan angka konkret seperti garis kemiskinan atau indikator kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Sementara itu, kemiskinan relatif lebih berfokus pada perbandingan tingkat kesejahteraan antara individu atau keluarga dalam suatu masyarakat.

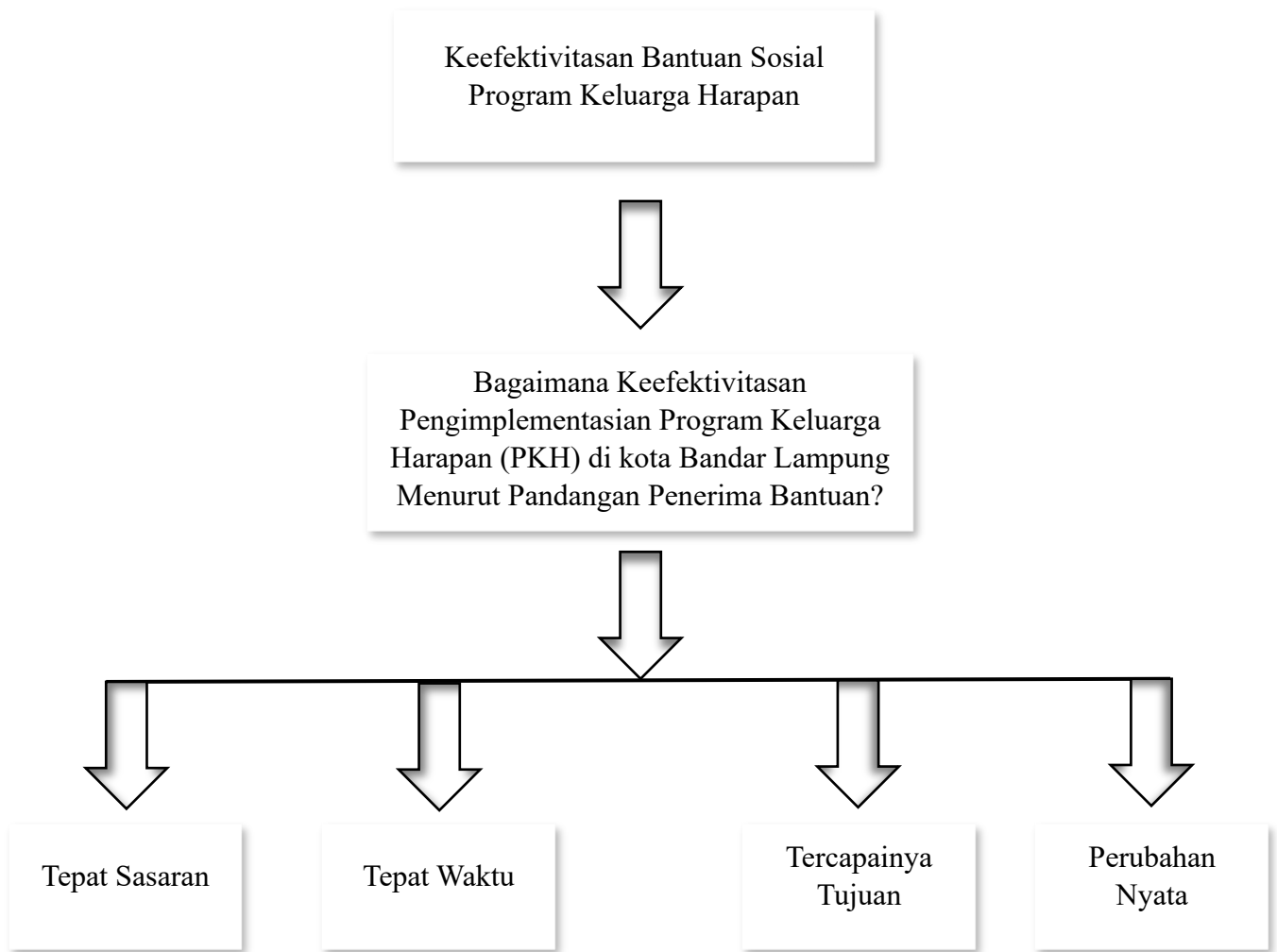
Pengertian kemiskinan dapat berbeda tergantung pada konteks dan negara. Menurut Bank Dunia, kemiskinan bisa diartikan sebagai hidup dengan pendapatan kurang dari USD \$1 per hari, sementara kemiskinan menengah terjadi ketika pendapatan harian kurang dari USD \$2. Sementara itu, pada tahun 2012, Badan Pusat Statistik Indonesia mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana pendapatan bulanan seseorang atau keluarga kurang dari Rp 233.000 atau Rp 7.000 per hari.

Dengan demikian, definisi kemiskinan dapat beragam tergantung pada wilayah geografis dan parameter yang digunakan untuk mengukurnya. Ini menggambarkan kompleksitas dalam memahami dan mengatasi masalah kemiskinan di berbagai konteks sosial dan ekonomi.

2.5 Kerangka Berpikir

Salah satu indikator keefektifan PKH adalah kemampuannya untuk mencapai keluarga yang membutuhkan bantuan sosial. Program ini dirancang untuk keluarga miskin dan rentan, sehingga keberhasilannya bergantung pada kemampuan dalam mengidentifikasi sasaran yang tepat. Dalam hal ini, efektivitas dapat diukur dengan memastikan bahwa keluarga penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkannya. Keefektifan PKH juga berkaitan dengan ketersediaan dan ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan. Jika bantuan disalurkan dengan cepat dan tanpa gangguan, maka program ini lebih efektif dalam membantu keluarga penerima untuk mengatasi kesulitan ekonomi mereka. Tujuan utama dari PKH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Efektivitas program ini dapat diukur melalui peningkatan akses keluarga terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan ekonomi keluarga penerima. Keefektifan PKH juga dapat dinilai berdasarkan perubahan yang nyata dalam kehidupan keluarga penerima. Ini bisa mencakup peningkatan dalam tingkat pendidikan anak-anak, peningkatan kesehatan keluarga, dan peningkatan pendapatan keluarga. Jika program ini berhasil menciptakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan keluarga penerima, maka dapat dianggap efektif. Kerangka pikir terdapat dalam Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Sumber: diolah peneliti, 2023

III. Metode Penelitian

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian kualitatif, yang secara khusus bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam terhadap suatu konteks tertentu. Dalam metode penelitian ini, peneliti memandang manusia sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Mereka secara cermat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang biasanya muncul dalam konteks yang sedang dipelajari. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada aspek kualitas dalam pengumpulan dan analisis data daripada sekadar berfokus pada kuantitas. Dengan demikian, penelitian kualitatif memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif, sesuai dengan Sugiyono (2017: 9), merupakan metode penelitian yang berakar pada pemikiran postpositivisme. Penelitian ini digunakan untuk menginvestigasi objek penelitian dalam kondisi yang alamiah, berbeda dari pendekatan eksperimental. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai sumber (triangulasi). Analisis data dalam penelitian ini cenderung bersifat induktif dan kualitatif, dengan penekanan pada pemahaman makna yang lebih dalam daripada upaya generalisasi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu panduan yang menentukan arah penelitian dengan tujuan mengumpulkan informasi serta memberikan pedoman dalam analisis, sehingga penelitian dapat mencapai hasil yang diinginkan. Sesuai dengan perumusan masalah, fokus penelitian ini adalah mengukur efektivitas Program Keluarga Harapan di Kota Bandar Lampung. Dalam konsep efektivitas, Muasaroh (2013: 13) menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang bisa digunakan sebagai penilaian efektivitas program:

1. Aspek tugas atau fungsi, yang merujuk pada kemampuan lembaga atau program untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai contoh, program pembelajaran dianggap efektif jika mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Aspek rencana atau program, mengacu pada sejauh mana rencana atau program pembelajaran dapat dijalankan dengan baik. Jika seluruh rencana dapat dilaksanakan, maka program tersebut dikatakan efektif.

3. Aspek ketentuan dan peraturan, yang berhubungan dengan penerapan aturan yang telah dibuat untuk menjaga kelancaran proses kegiatan. Efektivitas juga dapat dinilai dari sejauh mana aturan tersebut diterapkan dengan baik.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, yang mengukur efektivitas program berdasarkan pencapaian tujuan atau kondisi ideal yang telah ditetapkan. Evaluasi aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang telah dicapai.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma Al Muchtar, 2015: 243). Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Kota Bandar Lampung dengan memilih 2 kecamatan yaitu Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Teluk Betung Barat serta melibatkan Dinas Sosial Provinsi Lampung .

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, dengan peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati, menjadikannya sebagai observasi non-partisipatif. Selain itu, data juga diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup referensi dari buku, jurnal ilmiah, tesis, dan sumber informasi yang tersedia di media sosial.

Peneliti mendekati topik penelitian dengan pendekatan pengamatan objektif dan penelusuran informasi dari berbagai sumber yang relevan, termasuk literatur ilmiah dan sumber-sumber digital, untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan mendukung analisis penelitian.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Dalam upaya memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi. Konsep triangulasi, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017), melibatkan penggunaan elemen atau sumber lain di luar data asli sebagai alat untuk memeriksa atau membandingkan data tersebut.

Dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data atau menggunakan sumber data tambahan, peneliti dapat mengevaluasi data yang diperoleh dengan lebih baik. Ini membantu meminimalkan bias dan meningkatkan kepercayaan pada keabsahan hasil penelitian. Triangulasi merupakan suatu pendekatan yang penting dalam memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

3.6 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses yang dimulai sebelum peneliti memasuki lapangan, berlanjut selama di lapangan, dan bahkan setelah penelitian di lapangan selesai. Namun, dalam kenyataannya, analisis data kualitatif terjadi secara simultan dengan pengumpulan data. Data yang terkumpul harus diolah dengan cermat untuk mengubahnya menjadi informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung kontinu sampai selesai.

Miles dan Huberman, seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2009), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif mencakup tiga langkah utama:

1. **Data Display (Model Data):** Langkah awal dalam analisis data kualitatif adalah menciptakan model data. Model data ini adalah suatu struktur yang disusun untuk mendeskripsikan temuan dan tindakan yang akan diambil.
2. **Data Reduction (Reduksi Data):** Reduksi data merujuk pada proses seleksi, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang terdapat dalam catatan-catatan lapangan. Proses ini terus berlangsung selama proses penelitian dan tergantung pada keputusan peneliti, seperti kerangka konseptual, pertanyaan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan.
3. **Conclusion Drawing (Verifikasi):** Langkah ketiga dalam analisis adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai membuat catatan tentang makna, pola, penjelasan, konfigurasi, alur kausalitas, dan proposisi-proposisi yang mungkin muncul. Kesimpulan-konklusi ini awalnya mungkin masih kabur, tetapi seiring berjalannya penelitian, mereka menjadi lebih eksplisit dan fundamental melalui analisis yang mendalam.

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Kota ini awalnya bernama Tanjungkarang-Telukbetung, yang merupakan gabungan dari dua pemukiman besar di Lampung, sebelum berganti nama pada tahun 1983. Bandar Lampung merupakan penghubung antar pulau dan pintu gerbang utama ke Sumatera, dengan koneksi udara, jalan raya, dan kereta api. Industri rumahan di kota ini mencakup pengerjaan logam, tenun tangan, serta pembuatan tembikar dan ubin. Bandar Lampung merupakan pelabuhan utama dan pusat transportasi bagi kawasan pertanian di sekitarnya, yang memproduksi karet, teh, kopi, dan lada untuk ekspor. Penambangan perak dan peternakan juga berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Kota ini berpenduduk 873.007 jiwa pada tahun 2010. Budaya khas Bandar Lampung tercermin melalui bangunan-bangunannya, seperti rumah adat Lampung. Berkeliling di Bandar Lampung mudah dan relatif murah karena merupakan kota kecil. Perjalanan antara dua kawasan utama, Tanjungkarang dan Teluk Betung, hanya memakan waktu sekitar 30-40 menit dengan mobil.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung berlokasi di alamat Jalan Basuki Rahmat No.72, Bandar Lampung. Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah sebuah unit kerja yang berada di bawah pemerintah daerah Provinsi Lampung, dengan tanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan provinsi di sektor sosial, sesuai dengan prinsip otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur. Selain itu, dinas ini juga menjalankan tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak berdirinya, Dinas Sosial Provinsi Lampung telah mengalami berbagai perubahan, baik dalam struktur organisasi maupun dalam nama institusi tersebut.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan temuan dalam penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan terhadap penerima bantuan PKH di Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, evaluasi dilakukan menggunakan lima indikator yang diajukan oleh Sutrisno. Indikator tersebut mencakup pemahaman terhadap program, ketepatan sasaran, keterpenuhan target waktu, pencapaian tujuan, dan dampak nyata yang timbul.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis data dan temuan yang telah diperoleh dengan mempertimbangkan dan hanya mengambil empat indikator tersebut. Hal ini akan memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana Program Keluarga Harapan memberikan manfaat kepada penerima bantuan PKH di kedua kecamatan tersebut, serta bagaimana program tersebut berdampak pada pemahaman, ketepatan, waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan yang dapat diamati pada penerima manfaat.

1. Tepat Sasaran

Dalam menjalankan suatu kegiatan atau program, aspek ketepatan sasaran memiliki peran yang sangat krusial. Konsep ini didasari oleh teori yang diajukan oleh Budiani, di mana tingkat ketepatan sasaran suatu program dilihat dari sejauh mana peserta program sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal Program Keluarga Harapan, sasaran utamanya adalah peserta PKH yang telah melewati proses seleksi dan dinyatakan layak menerima bantuan PKH, yang sumber datanya berasal dari tingkat desa.

Setelah melakukan pengamatan dan mencapai kesimpulan bahwa sebagian besar penerima bantuan PKH adalah ibu rumah tangga (IRT) yang memiliki pekerjaan yang tidak menentu. Dalam konteks Program Keluarga Harapan di Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, observasi menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. Dengan kata lain, indikator ketepatan sasaran dapat dianggap efektif dalam memastikan bahwa bantuan PKH diberikan kepada individu atau keluarga yang memenuhi kriteria sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencerminkan kesesuaian yang baik antara peserta program dan tujuan program, serta menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di wilayah tersebut berjalan dengan efisien dalam hal ketepatan sasaran.

2. Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam proses pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki signifikansi penting, terutama karena program ini memberikan bantuan setiap tiga bulan kepada peserta PKH. Dalam hal ini, semua pemangku kepentingan (stakeholders) harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencairan bantuan sosial, khususnya PKH, dapat dilakukan tepat waktu. Keterlibatan setiap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PKH adalah penting untuk menjadikan program tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pencairan dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Teluk Betung Barat telah berjalan dengan baik. Meskipun tanggal pencairan dana tidak selalu tetap, namun dalam jangka waktu tiga bulan yang menjadi periode penerimaan dana PKH, pelaksanaan proses pencairan selalu berjalan lancar. Oleh karena itu, indikator ketepatan waktu dalam pelaksanaan PKH dapat dianggap sebagai efektif. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk memastikan pencairan dana PKH sesuai jadwal telah berhasil dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ini.

3. Tercapainya Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian, yang mencakup pengamatan dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, telah berjalan dengan baik. Program ini telah memberikan bantuan yang signifikan dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Namun demikian, meskipun terdapat pencapaian tujuan yang positif, tidak dapat dikatakan bahwa program ini sudah berjalan secara efektif dalam semua aspeknya. Yang kadang-kadang menggunakan dana PKH untuk membeli beras, atau seperti mengalokasikan dana bantuan PKH untuk kebutuhan dapur. Ini menunjukkan bahwa penggunaan dana PKH masih dapat bervariasi dan belum selalu terfokus pada tujuan program.

Dengan kata lain, indikator pencapaian tujuan program belum mencapai efektivitas penuh. Meskipun program ini memberikan bantuan yang signifikan kepada penerima manfaat, masih ada ruang untuk perbaikan dalam memastikan bahwa dana PKH digunakan secara konsisten sesuai dengan tujuan program. Upaya lebih lanjut

mungkin diperlukan untuk memastikan penggunaan dana PKH yang lebih terarah dan efektif sesuai dengan sasaran program.

4. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merujuk pada transformasi yang dapat dirasakan oleh individu atau kelompok terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau program tertentu. Untuk mengukur indikator ini, peneliti berfokus pada persepsi dan pandangan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan hasil penelitian, yang melibatkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Teluk Betung Barat, terkait dengan bantuan PKH, telah membantu mereka mengurangi beban biaya, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa belum ada perubahan yang signifikan dalam aspek ekonomi mereka.

Jika dilihat dari empat indikator tersebut, penulis berpendapat bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penerima bantuan di Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Teluk Betung Barat belum mencapai efektivitas penuh, terutama dalam mencapai tujuan jangka panjang seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun, di sisi lain, PKH telah membantu meringankan beban masyarakat dalam mencapai tujuan jangka pendek, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, program ini memegang peran penting dalam membantu masyarakat dalam mengatasi beban keuangan sehari-hari meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam mencapai tujuan jangka panjang.

V. Penutup

5.1 Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan bantuan yang membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat di Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Teluk Betung Barat. Meskipun demikian, PKH belum mencapai efektivitas penuh dalam hal penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan, sebagaimana dilihat dari kurangnya perubahan yang signifikan yang dialami masyarakat.

Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Program Keluarga Harapan di Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Teluk Betung Barat, khususnya dalam mencapai indikator tujuan dan perubahan nyata. Hal ini terjadi karena masih ada penerima bantuan yang menggunakan dana yang mereka terima di luar ketentuan yang telah ditetapkan, misalnya untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan peralatan dapur karena alasan tertentu.

Selain itu, dari hasil penelitian, terlihat bahwa sebagian masyarakat cenderung bergantung pada bantuan dana PKH secara terus-menerus, yang mengubah pola pikir mereka menjadi kurang mandiri. Hal ini bertentangan dengan tujuan PKH, yang seharusnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

Dalam konteks perubahan nyata yang diharapkan dari PKH, program ini belum sepenuhnya mencapai apa yang diharapkan dalam hal peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang di Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Teluk Betung Barat. Namun, di sisi lain, PKH telah memberikan bantuan yang membantu mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari, terutama dalam jangka pendek. Oleh karena itu, masih ada ruang untuk perbaikan dalam mencapai tujuan jangka panjang program ini.

5.2 Saran

Bagi penerima bantuan PKH, disarankan untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam penggunaan dana bantuan. Selain itu, penting untuk mengubah pola pikir menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Program PKH seharusnya dilihat sebagai bantuan dari pemerintah, bukan sebagai gaji atau upah. Oleh karena itu, masyarakat harus berusaha lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Selain itu, terkait dengan penggunaan bantuan dana PKH, keluarga penerima manfaat dapat mempertimbangkan untuk mengalokasikan dana tersebut pada hal-hal yang lebih produktif,

seperti membuka usaha kecil-kecilan. Hal ini dapat membantu mereka mendapatkan hasil atau keuntungan tambahan, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Dengan demikian, pemanfaatan dana PKH akan lebih berdampak positif dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Nurandani, M., & Utoyo Sutiyoso, B. (2022). *EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA BANDAR LAMPUNG*. 16(01), 97–106.
<https://doi.org/10.37295/wp.v16i2.116>
- Bakulu, B., Pangkey, M., & Kolondam, H. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101).
- Beban Pengeluaran Keluarga Miskin Di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Ananda Dwi Arum, M., & Sihombing, T. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya. In *Jurnal Professional* (Vol. 9, Issue 2).
- Besar, G., Publik, K., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Abstrak, U. (n.d.). *KEMISKINAN DAN KONSEP TEORITISNYA Oleh : Yulianto Kadji*.
- Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1-9.
- Ekonomi, J. :, Fakultas, S., Ekonomi, :, & Islam, D. B. (n.d.). *SKRIPSI EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur) Oleh: DESI PRATIWI NPM. 1502040021*.
- Karisma, R. N. (n.d.). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA CISADAP KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS*.
- Mengentaskan Kemiskinan, D., Di, S., Bumi, D., Kecamatan, R., Kabupaten, A. S., & Utara, L. (n.d.). *EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)*.
- Nuraida, N. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cislak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 148-165.
- Pananrangi, A. R., & Maldun, S. (2021). Kebijakan Pemerintah dan Program Keluarga Harapan.

Papilaya, J. (2020). Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal bimbingan dan konseling terapan*, 4(1).

PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018. (n.d.).

Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>

Subadi, W. (n.d.). *EFEKTIVITAS BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PUAIN KIWA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG*.

Usman, C. (n.d.). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo)*.

<https://www.britannica.com/place/Bandar-Lampung> (diakses pada 13/10/2023)

<https://dinsos.bandarlampungkota.go.id/> (diakses pada 13/10/2023)

<https://www.indonesia-tourism.com/lampung/bandar-lampung.html> (diakses pada 13/10/2023)